

**PRPOSAL INOVASI**  
**KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH**  
**BELANJA PENGADAAN BARANG DENGAN KARTU KREDIT**  
**( BANKER )**

**I. Bidang Inovasi** : Pelayanan publik

**II. Judul Inovasi** : Belanja dengan Kartu Kredit ( Banker )

**III. Tanggal, Bulan Tahun Pengembangan Inovasi** : Tahun 2023

**IV. Inovator**

Penanggungjawab : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

Koordinator I : Sidik Muktiaji

Koordinator II : Dra. Arum Widyasti

Anggota : Anita Kurniasari SE

**V. Organisasi Perangkat Daerah Inovator/Organisasi Unit Layanan Pemerintah Kota**  
: Badan Keuangan dan Aset Daerah

**VI. Latar Belakang Permasalahan** : Sebagai upaya untuk mendukung penggunaan pruduk-pruduk dalam negeri, terutama pruduk usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM ). Belanja pemerintah melalui barang dan jasa diprioritaskan untuk pembelian pruduk pruduk dalam negeri.

Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah daerah (KKPD) merupakan system atau bagian aksi afirmasi belanja pemerintah dalam semangan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI ) yang di canangkan dalam bentuk implementasi Inpress nomor 2 tahun 2022 terkait penggunaan transaksi non tunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah Pusat dan daerah

Selanjutnya BKAD menindaklanjuti permendagri Nomor 79 Tahun 22 tentang petunjuk teknis penggunaan KKPD dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan belanja daerah dengan Menyusun regulasi dan persyaratan dan Perjanjian Kerjasama ( PKS )

Secara teknis KKPD ini akan menjadi sumber dana bagi satuan kerja saat melakukan belanja barang dan jasa modal aplikasi mobile banking maupun kartu kredit

**VII. Tujuan Melakukan Inovasi**

**Tujuan Jangka Pendek :**

1. Penerapan penggunaan KKP ke 33 Organisasi Perangkat Daerah
2. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalis uang tunai, mengurangi fraud dan transaksi tunai
3. Efektif dalam mengurangi uang persediaan menganggur ( idle cash)

### **Tujuan Jangka menengah :**

1. Optimalisasi penggunaan uang persediaan per satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional .
2. Mendorong penyerapan dana lebih efektif dan efisien

### **Tujuan Jangka panjang :**

3. Optimalisasi penggunaan uang persediaan per satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional .
4. Penggunaan KKP di seluruh satuan kerja di lingkungan pemerintah kota madiun

## **VIII. Manfaat**

### **Manfaat Internal :**

1. Bendahara tidak diwajibkan untuk memungut PPN dan PPH22 sesuai PMK No.59/PMK03/2022
2. Kemudahan dan kecepatan transaksi baik secara fisik maupun online

### **Manfaat Eksternal :**

1. Meningkatkan pendapatan UMKM
2. Mempermudah belanja pengadaan melalui platform yang diadakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah ( LKPP )

## **IX. Rancang Bangun atau Disain Inovasi**

Perancang penatausahaan proses pengajuan SPP/SPMGU kartu kredit sampai dengan laporan pembukuan adalah Tim BKAD

Fasilitas penerbitan kartu kredit bekerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah dalam hal ini Bank Jatim Cabang Madiun sebagai bank penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

## **X. Kebaruan atau Keunikan atau keaslian**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Permendagri No 79 Tahun 2022 sesuai dengan Perwal No 38 Tahun 2023 tentang petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## **XI. Data Potensi Inovasi Daerah**

### **Data potensi inovasi daerah sebagai indikator inovasi :**

- Regulasi Inovasi Daerah
- Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah
- Kualitas inovasi
- Kecepatan inovasi
- Kemanfaatan inovasi

## **XII. Daftar Lampiran**

**Madiun 10 Agustus 2023**

**KEPALA BADAN KEUANGAN**

**DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN**



**SUDANDI, S.Sos**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19720925 199201 1 002**